

Dipo Alam: Cermin Kepemimpinan dan Pencitraan SBY

Muslikhin

Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi, Sekolah Paskasarjana Universitas Paramadina

Abstract: *Dipo Alam has so many times politicized the corruption cases for Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) interest, both as his capacity as president and the leader of Partai Demokrat (Democratic Party). The aim is clear, to upgrade the image of SBY as an anti-corruption figure and to strengthen his position as the number one figure in Indonesia. Moreover, it also helps to picture that not only the members of Democratic Party who corrupt but also the members of other political parties. In fact, the leadership of SBY can be categorized as what so-called leisure leadership, for he often avoids substantial issues and it is common for him to care at lipstical matters.*

Kata Kunci: *Dipo Alam; SBY; pencitraan*

Pendahuluan

Sosok Sekretaris Kabinet Dipo Alam sedang dalam sorotan publik. Bahkan anggota Komisi I DPR Lily Wahid pada 21 Desember lalu melaporkan Dipo Alam ke Bareskrim Mabes Polri karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang. (inilah.com, 21 Desember 2012: 16:07 WIB). Dipo Alam diduga telah melanggar UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara karena mengirim surat ke Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan terkait optimalisasi anggaran. Dalam surat tersebut, Dipo Alam meminta Kemenkeu memblokir atau membintangi dana optimalisasi di Kementerian Pertahanan untuk TNI AL senilai Rp 678 miliar. Sekab menduga ada kongkalikong praktek korupsi APBN di Kementerian Pertahanan. Akibat surat dari Dipo Alam, ada mata anggaran di Kementerian Pertahanan diblokir oleh Kementerian Keuangan.

Pada 6 Agustus 2012, Dipo Alam mengirimkan surat ke Menteri Keuangan bernomor R 172-1/Seskab/VIII/2012. Perihal Klarifikasi Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Non Pendidikan APBN-P Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pertahanan. Dalam surat itu disebutkan Dipo meminta kepada Menteri Keuangan memberikan klarifikasi mengenai jumlah satuan harga dan urgensi pengadaan beberapa peralatan militer senilai Rp 678 miliar, yang meliputi pengadaan 1 paket enkripsi senilai Rp350 miliar, 1 paket tactical communication senilai Rp15 miliar, 1 paket Monobs DF senilai Rp115 miliar, dan 135 alat selam senilai Rp198 miliar (kompas.com, 10 Desember 2012: 21 :35 WIB)

Langkah Dipo Alam berkirim surat kepada Menteri Keuangan berujung pada pemblokiran anggaran dinilai Lily Wahid menabrak aturan ketatanegaraan. Sebuah lembaga yang diketuai berdasarkan Peraturan Presiden dalam pandangan Lily Wahid tidak bisa masuk terlalu jauh sampai memblokir anggaran. (kompas.com, 21 Desember 2012). Pendapat Lily Wahid tampaknya masuk akal, sebab Sekretaris Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden N0.82 tahun 2010 tugasnya adalah memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. (sekab.go.id)

Tindakan Dipo Alam juga membuat Komisi I DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian Pertahanan bereaksi keras. Pada 6 Desember 2012 Komisi I DPR memanggil pihak terkait seperti Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengadakan rapat kerja gabungan. Rapat

bertujuan untuk mengklarifikasi tuduhan Dipo Alam tentang adanya dugaan kongkalikong praktek korupsi APBN di Kementerian Pertahanan. Tetapi yang hadir yang Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Tetapi yang hadir yang Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dipo Alam dan BPKP tidak datang. Ketidakhadiran Dipo Alam oleh dinilai Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasan sebagai tindakan pengecut. Sudah melempar tuduhan, tetapi ketika diundang untuk mengklarifikasi tidak datang.

Akhirnya Dipo Alam pada 10 Desember 2012 datang memenuhi panggilan Komisi I DPR untuk melakukan klarifikasi soal tuduhan adanya kongkalikong APBN dalam Kementerian Pertahanan. Sesuai rapat kerja dengan Dipo Alam, Komisi I DPR menyimpulkan bahwa tindakan Seskab Dipo Alam yang melayangkan surat ke Menkeu untuk membentangi anggaran optimalisasi Kemenhan 2012 sebesar Rp 67,8 miliar, sebuah tindakan yang tidak memiliki landasan hukum dan melebihi kewenangan yang dimiliki Seskab sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. (jurnalparlemen.com, 18 Desember 2012). Pimpinan Komisi I DPR membuat surat ke pimpinan DPR yang isinya berupa kesimpulan atas tindakan Dipo Alam tersebut. Komisi I DPR juga meminta agar pimpinan DPR meminta Presiden untuk menegur Dipo Alam atas tindakannya mengirim surat ke Kementerian Keuangan soal adanya dugaan kongkalikong APBN.

Menindaklanjuti permintaan Komisi I DPR, Pimpinan DPR pada 21 Desember 2012 mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar presiden menindaklanjuti surat dari Pimpinan Komisi I sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat bernomor PW12047 /DPR RI/XII/2012 antara lain berisi:

1. Berkaitan dengan pemberian tanda bintang tersebut, Komisi I DPR RI berpandangan bahwa pemberian tanda bintang oleh Kementerian Keuangan terhadap Dana Optimalisasi Kemhan/TNI T.A 2012 dilakukan secara sepihak tanpa adanya pembahasan bersama dengan DPR RI (Komisi I DPR RI), dimana Dana Optimalisasi Kemhan/TNI T.A. 2012 tersebut telah disetujui oleh Komisi I DPR RI.
2. Komisi I DPR berpandangan, berkaitan dengan tindakan Dipo Alam, telah terjadi pelanggaran terhadap sejumlah Undang-Undang, yaitu: a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012; b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan d. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Negara Non Departemen.
3. Terhadap Pernyataan Sekretaris Kabinet, Sdr. Dipo Alam, di media massa mengenai adanya indikasi kongkalikong dalam penyusunan anggaran Kementerian/Lembaga dengan DPR RI, Komisi I DPR RI berpandangan bahwa pernyataan tersebut telah merugikan DPR RI secara kelembagaan dan merupakan bentuk "Contempt of Parliament". (www.rmol.co, 22 Desember 2012, 06:41 wib)

Kemarahan Komisi I DPR kepada Sekab Dipo Alam bermula ketika pada 14 November 2011, Dipo melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong anggaran dengan DPR. Tiga kementerian yang dilaporkan Dipo Alam ke KPK adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. (detik.com, 14 November 2012). Alasan yang digunakan Dipo Alam untuk melaporkan tiga kementerian ke KPK karena adanya arahan dan instruksi presiden SBY tentang upaya pencegahan korupsi. (detik.com, 26 November 2012).

Permasalahan

Berdasarkan paparan di atas, muncul pertanyaan mengapa Dipo Alam sebagai Sekab berani melaporkan tiga kementerian ke KPK tentang dugaan adanya kongkalikong anggaran dengan DPR? Bagaimana menjelaskan langkah-langkah Dipo Alam dilihat dari perspektif komunikasi politik dan kepemimpinan Presiden SBY? Apa tujuan dibalik langkah Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong anggaran dengan DPR?

Tugas dan Wewenang Sekab

Sekretariat Kabinet RI (Setkab) adalah sebuah Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, menyiapkan penyelenggaraan sidang kabinet, serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintah dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya berada di tangan Presiden dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sekretaris Kabinet (Sekab) dalam pemerintahan SBY dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden N0.82 tahun 2010. Fungsi Sekretariat Kabinet berdasarkan PP N0.82 tahun 210 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet;
- b. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat dan pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/ atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penyampaian, publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut.
- f. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan, dan protokol yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;
- g. Penyiapan, penyelenggaraan dan pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

- i. Pengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;
- k. Koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pemberian dukungan staf, teknis dan administrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden;
- l. Penyelenggaraan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet.(setkab.go.id)

Dipo Alam dan Kepemimpinan Santai SBY

Bernard Bass seperti dikutip Eko Maulana Ali dalam Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan (2012) membagi kepemimpinan dalam tiga kategori yaitu; kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan santai (*laissez faire leadership*). Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan di mana pemimpin dan pengikut membangun secara bersama-sama motivasi dan moralitas dalam menjalankan aktivitas dan program organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kepemimpinan ini terdiri atas empat faktor yaitu *charisma*, *individual consideration*, *inspiration*, dan *intellectual stimulation*.

Kepemimpinan transformasional menggunakan keempat faktor tersebut dalam memimpin. Kepemimpinan transaksional adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin memberikan motivasi kepada pengikutnya dengan cara memberikan penghargaan atau imbalan (*rewards*) sebagai bagian dari balas jasa atas kerja dan kinerja yang dicapainya.

Kepemimpinan santai menurut Bass adalah bukan pemimpin. Pemimpin santai menghindari untuk mencoba mempengaruhi bawahannya dan mengabaikan kekuasaannya. Kebanyakan tanggung jawab diberikan kepada bawahannya atau pengikutnya, tugas-tugas untuk anak buahnya membingungkan, saat membuat kebijakan tidak melibatkan anak buahnya. Kepemimpinan santai biasanya tidak aktif dan tidak efektif. Kebijakan-kebijakan yang penting dalam suatu organisasi tidak dibuat, walaupun dibuat selalu terlambat. Dalam kepemimpinan santai seakan-akan tidak ada tanggung jawab kepemimpinan. Kewenangan sebagai pemimpin dibiarkan begitu saja, tidak digunakan secara efektif. Dalam kepemimpinan santai, pemimpin selalu menghindari untuk terlibat apabila muncul isu-isu penting.

Dengan menggunakan pisau analisa kategori kepemimpinan Bass, langkah Dipo Alam sebagai Sekab melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong APBN antara kementerian dan anggota DPR mencerminkan gaya kepemimpinan santai yang dilakukan oleh Presiden SBY. Ada beberapa indikator yang mencerminkan SBY adalah seorang pemimpin santai. Pertama, Presiden SBY menghindari untuk mempengaruhi bawahannya dan mengabaikan kekuasaannya. SBY lebih memilih melepaskan tanggung jawabnya kepada anak buah dalam hal ini Dipo Alam. SBY pasti tahu, tugas dan wewenang Sekab adalah membantu kelancaran dan memberi masukan informasi kepada presiden dan wakil presiden. Sehingga SBY memerintahkan Dipo Alam agar informasi adanya kementerian yang melakukan kongkalikong APBN dengan anggota DPR dilaporkan kepadanya. Jika informasinya betul, SBY segera menindak anak buahnya yang terindikasi melakukan kongkalikong, misalnya dengan mengganti menteri yang bersangkutan. Selanjutnya setelah diganti menteri yang diduga melakukan korupsi dilaporkan ke KPK untuk ditindaklanjuti proses hukumnya. Tapi yang dilakukan SBY adalah membiarkan, mungkin juga menyuruh Dipo

Alam untuk melaporkan tiga kementerian yang ada di bawah SBY ke KPK karena diduga melakukan kongkalikong anggaran. Sikap SBY tersebut sesuai dengan indikator kepemimpinan santai kedua yaitu selalu menghindari untuk terlibat apabila isu-isu penting muncul. SBY tidak berani untuk menindak anak buahnya yang diduga melakukan kongkalikong anggaran. Yang dilakukan SBY justru menghindari dari isu adanya korupsi yang dilakukan menternya. Dengan membiarkan Sekab melaporkan dugaan adanya korupsi yang dilakukan anak buahnya, SBY seperti mau cuci tangan atas adanya dugaan korupsi dan menghindari untuk menindak anak buahnya yang diduga melakukan korupsi. SBY menyerahkan urusan yang sangat penting tersebut kepada Sekab Dipo Alam, yang bisa diartikan SBY tidak mau terlibat atau bisa disebut juga lari tanggung jawab. Setelah dilaporkan ke KPK oleh Sekab pun SBY tidak melakukan apa-apa terhadap tiga kementerian yang diduga melakukan kongkalikong dugaan korupsi bersama anggota DPR. SBY sekali lagi seperti menghindari untuk menindak anak buahnya yang diduga melakukan korupsi APBN. SBY seperti indikator pemimpin santai merasa tidak bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan bawahannya.

Indikator yang ketiga kepemimpinan santai adalah tidak aktif dan tidak efektif. Dampak dari langkah Dipo Alam yang melaporkan tiga kementerian ke KPK adalah perpecahan dan saling curiga di dalam tubuh Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan SBY. Para menteri menjadi tidak nyaman bekerja dan menjadi kurang menghargai SBY sebagai presiden karena membiarkan Dipo Alam melakukan tindakan yang merugikan kementerian lain. Keadaan ini menjadikan kerja di kabinet tidak efektif karena sebagai presiden SBY tidak mengendalikan jalannya pemerintahan tetapi membiarkan semuanya berjalan-jalan sendiri-sendiri atau Negeri Auto Pilot, negeri tanpa pemimpin.

Gaya kepemimpinan santai yang dipraktikkan SBY selama menjadi presiden juga dirasakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hassan. Menyikapi langkah Dipo Alam yang melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong APBN antara kementerian dengan anggota DPR, Tubagus Hassanudin berpendapat selama 11 tahun pengalamannya di lingkungan Istana, seharusnya persoalan yang terjadi di lingkungan Istana dalam hal ini di kabinet diselesaikan secara internal bukan dilempar ke sana kemari. TB Hasan yang mantan Sekretaris Militer Kepresidenan menilai langkah Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK menunjukkan seolah-olah tidak ada pemimpin di negeri ini. (kompas.com, 6 Desember 2011).

Kepemimpinan santai yang dilakukan SBY sebetulnya sudah dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Publik menyebut kepemimpinan yang dilakukan SBY selama menjadi presiden dengan berbagai sebutan, misalnya pemimpin yang peragu, kepemimpinan lemah, tidak tegas dan semacamnya yang bila dikategorikan ke dalam klasifikasi yang dikemukakan oleh Bass masuk ke dalam pemimpin santai. Akibat pemimpin santai yang oleh Bass disebut juga bukan sebagai kepemimpinan, menyebabkan banyak masalah di Indonesia tidak selesai-selesai dan berlarut-larut. Fraksi Partai Hanura dalam catatan akhir tahun 2012 menyatakan berlarut-larutnya berbagai permasalahan di Indonesia disebabkan oleh kepemimpinan nasional lemah, tidak tegas dan lebih mengedepankan politik pencitraan. (rmol.co, 29 Desember 2012)

Dipo Alam dan Produksi Wacana Kekuasaan

Langkah Dipo Alam melaporkan tiga kementerian yang diduga melakukan kongkalikong anggaran dengan oknum anggota DPR juga terkait dengan produksi wacana kekuasaan seperti dikemukakan Michael Foucault. Seperti diketahui, konsep wacana

menurut Michael Foucault berbeda dengan konsep wacana menurut para ahli seperti Tew Van Dijk, Ferdinand de Saussure ataupun ahli-ahli lain yang berkecimpung dalam dalam kajian analisis wacana. Foucault seperti diuraikan Eriyanto (2012: 65) memahami wacana bukan serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi sesuatu yang memproduksi yang lain seperti sebuah gagasan, ide, konsep atau efek. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpiir dan bertindak tertentu. Menurut Foucault produksi wacana selalu terkait dengan kekuasaan. Foucault memaknai kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak dimiliki tetapi dipraktikkan.

Wacana dalam pandangan Foucault selalu mempunyai keterkaitan dengan kenyataan. Realitas dipahami sebagai konstruk yang dibentuk melalui wacana. Menurut Foucault, pandangan kita tentang suatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif. Wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipandang benar. Perspektif kita tentang suatu obyek dibentuk dengan dibatasi oleh praktek diskursif; dibatasi oleh pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang ini benar dan yang lain tidak.

Wacana dalam pandangan Foucault seperti diuraikan Eriyanto (2012:74) membatasi bidang pandangan kita, mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam batas-batas yang telah ditentukan objek bisa jadi tidak berubah, tetapi struktur diskursif yang dibuat membuat objek menjadi berubah. Ciri utama wacana adalah kemampuannya untuk menjadi suatu himpunan wacana yang berfungsi membentuk dan melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbedas satu sama lain. Tetapi kekuasaan mendukung salah satu wacana sehingga menjadi dominan dan yang lain terpinggirkan.

Sekarang bagaimana meletakkan wacana Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK yang peristiwanya dimuat di Kompas.com, Rabu 14 November 2012, pukul 21 :48 WIB ke dalam perspektif Analisis Wacana model Foucault tersebut di atas?

Melaporkan adanya dugaan korupsi ke KPK sebetulnya adalah hal biasa dan banyak dilakukan oleh masyarakat. Dipo Alam sebagai anggota masyarakat juga tidak dilarang untuk melaporkan ke KPK jika mengetahui adanya dugaan tindak korupsi di lembaga yang dipimpinnya. Ini juga sudah dilakukan oleh pejabat lain seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Ketua MK Mahfud MD. Objek “melaporkan dugaan adanya tindak korupsi” tidak berubah, tetapi struktur diskursif yang ada di masyarakat yang mengatakan bahwa menjadi aneh kalau ada anggota kabinet dalam pemerintahan SBY melaporkan anggota kabinet yang lain karena diduga melakukan kongkalikong anggaran ke KPK. Masyarakat akan bertanya mengapa Dipo Alam tidak melaporkannya ke Presiden SBY sebagai atasan dari para menteri tetapi langsung ke KPK? Sebab tugas dari Sekab adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan struktur diskursif yang ada di masyarakat bahwa seharusnya Dipo Alam sebagai bawahan presiden melapor ke presiden bukan ke KPK membuat masyarakat memahami langkah Dipo Alam sebagai cermin adanya keretakan dalam kabinet pemerintahan SBY. Selain itu langkah Dipo Alam juga bisa dipahami bahwa SBY sengaja seperti melakukan politik adu domba antara Sekab dengan para menteri yang diduga melakukan kongkalikong.

Langkah Dipo Alam ke KPK juga bagian dari produksi wacana kekuasaan. Dalam pandangan Foucault, strategi kuasa tidak bekerja melalui penindasan, melainkan melalui

normalisasi dan regulasi, menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol lewat kekuasaan yang sifatnya fisik tetapi dikontrol, diatur dan didisiplinkan lewat wacana. Dalam konteks inilah, langkah Dipo Alam bisa dipahami sebagai upaya untuk menundukkan publik, untuk mengontrol publik, untuk mendisiplinkan masyarakat soal perang melawan korupsi yang menjadi konsen oleh Pre- siden SBY . Wacana untuk menundukkan masyarakat ini muncul karena adanya skeptisme masyarakat terhadap keseriusan Presiden SBY dalam memberantas korupsi. Saat rapat dengan Komisi II DPR pada 26 November 2011, Dipo Alam menjelaskan:

“Saya ingin bacakan konsen Presiden terhadap pemberantasan korupsi, karena beliau dikatakan oleh pengamat, tidak konsisten, tebang pilih dan sebagainya. Tatkala kami melaksanakan hal ini juga dikatakan pencitraan, tidak harmonis. Saya catat sebagai Seskab, Presiden telah 13 kali mengingatkan kepada anggota kabinet untuk tidak kongkalikong” (kompas.com, 26 November 2011).

Wacana yang diproduksi Dipo Alam ingin menundukkan masyarakat bahwa yang diduga melakukan korupsi adalah bukan lembaga kepresiden, tetapi anggota DPR dan sebagian anggota kabinet. SBY sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sangat serius dan tanpa pandang bulu dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Langkah Dipo Alam tersebut juga sebagai bagian dari upaya untuk mendisiplinkan masyarakat, anggota DPR dan para menteri untuk tidak melakukan korupsi terhadap anggaran Negara. Presiden SBY seperti diuraikan Dipo Alam, pada 19 Juli 2012 dalam rapat kabinet menyatakan prihatin benar bahwa makin terbuka adanya penyimpangan anggaran di eksekutif dan legislative (kompas.com, 26 November 2011). Langkah Dipo tersebut bisa dipahami sebagai cara SBY untuk mendisiplinkan anggota legislative dan eksekutif agar tidak lagi melakukan korupsi anggaran.

Wacana Dominan dan Terpinggirkan

Produksi wacana dalam pandangan Foucault melahirkan wacana dominan dan wacana terpinggirkan. Wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu obyek harus dibaca dan dipahami. Pandangan yang lebih luas menjadi terhalang karena yang ada adalah pilihan yang sudah tersedia dan siap pakai. Pandangan dibatasi hanya dalam struktur diskursif tersebut, tidak dengan yang lain. Keadaan ini menyebabkan wacana lain yang tidak dominan menjadi terpinggirkan.

Wacana dominan dari Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK adalah bahwa Presiden SBY serius dan konsen dalam upaya memerangi korupsi. Presiden tidak pandang bulu, tidak tebang pilih dalam memerangi korupsi seperti yang telah diuraikan dalam uraian soal produksi wacana kuasa di atas. Wacana lain di luar keseriusan Presiden SBY dalam memerangi korupsi akan menjadi wacana terpinggirkan.

Dipo Alam dan Pencitraan Pemerintahan SBY

Citra atau pencitraan dapat didefinisikan sebagai konstruksi atau representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya dalam masyarakat. Pencitraan adalah proses pembentukan citra melalui informasi yang diterima oleh khalayak secara langsung atau media sosial atau media massa. (Arifin: 2011 : 179). Jalaludin Rakhmat dalam buku Psikologi Komunikasi berpendapat citra adalah gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas (2001 : 233).Citra adalah dunia menurut persepsi kita yang dibentuk berdasarkan informasi yang kita terima.

Daan Nimo (2000 : 6-7) menyatakan citra seseorang tentang politik yang terjalin dalam pikiran, perasaan dan kesucian subyektif memiliki tiga fungsi; Pertama; Betapaun benar atau salah, lengkap atau tidak, pengetahuan orang tentang politik memberi alan pada seseorang untuk memahami sebuah peristiwa politik tertentu. Kedua; Kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentang politik menjadi dasar untuk menilai objek politik. Ketiga; citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan dirinya a dengan orang lain.

Langkah Dipo Alam sebagai Sekab melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong dengan DPR untuk mengkorupsi APBN adalah bagian dari politik pencitraan pemerintahan SBY dan sekaligus SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. SBY melalui langkah Dipo Alam ingin membangun atau menampilkan citra sebagai pemimpin yang anti korupsi. Sebab, seperti dijelaskan oleh Juru Bicara Presiden, Julian Pasha, apa yang dilakukan Dipo Alam atas sepengetahuan presiden (detik.com, 17 November 2011). Bagaimana menjelaskan bahwa langkah Dipo Alam hanyalah sekedar pencitraan bagi SBY ?

Tampaknya Presiden SBY sedang "galau" dengan adanya beberapa kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Bukan hanya kader biasa tetapi jajaran pengurus DPP Partai. Selain pengurus partai, anggota kabinet SBY yaitu Menpora Andi Mallarangeng juga diduga terlibat kasus dugaan korupsi dalam proyek Hambalang. Memang saat Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK Andi Mallarangeng belum ditetapkan sebagai tersangka, tetapi pejabat-pejabat Kemenpora seperti Sekretaris Menteri Wafid Muharam dan pegawai Kemenpora lainnya, Dedi Kusdinar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Andi Mallarangeng sendiri sudah beberapa kali diperiksa KPK dan tinggal menunggu waktu untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Pemberitaan yang gencar dan terus menerus terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader-kader Partai Demokrat telah membuat citra buruk partai di mata masyarakat. Ini terbukti dengan hasil survey berbagai lembaga survey, termasuk yang dilakukan CSIS, menempatkan popularitas Partai Demokrat di bawah Partai Golkar dan PDIP (Vivanews, 13 Agustus 2012). Dan yang lebih merisaukan Presiden SBY adalah popularitas Pemerintahan SBY yang terus merosot di mata masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan Berdasarkan survei yang dilakukan lembaga Charta Politika, approval rating Pemerintahan SBY -Boediono berada di bawah ambang psikologis pemilih. Yaitu lebih dari 50% responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah. Yang puas hanya 39%.

Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah disebabkan dua hal yakni: jebloknya kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan hukum serta persepsi publik yang negatif terhadap kinerja menteri partai politik. Ketidakpuasan terhadap kinerja ekonomi mencapai 67,4% dan hukum 58,3%. Masyarakat menilai kondisi ekonomi rumah tangga dibanding setahun yang lalu mengecewakan. Sebanyak 47,8% responden menilai kondisi perekonomian rumah tangga tidak berubah. (Beritasatu.com, 30 Agustus 2012).

Selain itu, kasus korupsi yang dilakukan kader Partai Demokrat seperti menampar muka SBY baik sebagai Ketua Dewan Pembina maupun sebagai presiden. Dalam berbagai kesempatan padahal SBY selalu menyerukan perang melawan korupsi, bahkan SBY pernah menyatakan akan berdiri paling depan untuk melawan korupsi. Tetapi realitas yang Kasus korupsi yang menjerat kader-kader Partai Demokrat seperti menampar muka SBY

Untuk menaikkan popularitas Partai Demokrat dan Pemerintahan SBY, Dipo Alam sebagai bawahan SBY melakukan langkah-langkah zig-zag yang terlihat populis karena isu yang diangkat menjadi isu bersama masyarakat yaitu perang melawan korupsi. Langkah Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong APBN yang

berpotensi merugikan negara mendapat ekspose secara besar-besaran oleh semua media massa di Indonesia, baik saat peristiwa itu berlangsung maupun beberapa hari setelahnya.

Pesan yang ingin disampaikan melalui langkah Dipo Alam adalah SBY sebagai presiden sangat serius memberantas korupsi, sehingga siapapun yang diduga melakukan korupsi walaupun itu bawahannya sendiri akan dilaporkan ke KPK. Kedua, korupsi yang merampok uang negara dalam APBN bukan hanya dilakukan oleh birokrasi atau menteri bawahan presiden, tetapi karena ada kerjasama dengan anggota DPR, anggota legislatif. Dengan kedua pesan tersebut maka citra SBY dan pemerintahannya yang anti korupsi akan tetap muncul dan melekat dipikiran masyarakat. Melalui langkah Dipo Alam, masyarakat akan menilai yang korupsi adalah bawahan presiden dan anggota DPR, dan bukan presiden. Ketika presiden mengetahui ada anak buahnya yang melakukan korupsi maka segera dilaporkan ke KPK untuk ditindak.

Kesan bahwa langkah Dipo Alam hanya sekedar pencitraan bagi SBY makin menguat karena sejak Dipo ke KPK sampai sekarang tidak ada tindakan nyata untuk menindak anggota kabinetnya yang diduga melakukan korupsi. Sampai sekarang, para menteri yang dilaporkan ke KPK tetap bekerja seperti biasa. Bahkan kabar kalau Presiden SBY menegur tiga menteri yang dilaporkan Dipo Alam juga belum terdengar.

Dipo Alam dan Pengalihan Perhatian

Selain untuk pencitraan SBY, langkah Dipo Alam bisa dipahami sebagai cara SBY untuk melakukan pengalihan perhatian. Seperti diketahui bersama, kasus korupsi proyek Hambalang dan korupsi di Kemendiknas, Suap di Buol yang melibatkan kader-kader Partai Demokrat mendapat pemberitaan yang intensif dan luas dari media massa. Hampir tiap hari selalu ada berita tentang kader demokrat yang terjerat kasus korupsi seperti Angelina Sondakh, Hartati Murdaya, Nazaruddin Syamsudin. Pemberitaan yang luas tentang korupsi oleh kader Partai Demokrat tentunya sangat merugikan citra Partai Demokrat.

Untuk melarang media memberitakan kader Partai Demokrat yang korupsi jelas tidak mungkin. Maka yang dilakukan adalah mengalihkan perhatian media dari kasus korupsi oleh kader Partai Demokrat ke kasus lain. Agar perhatian media bisa teralih harus diciptakan peristiwa yang nilai beritanya lebih tinggi atau lebih kuat dari kasus-kasus sebelumnya. Dugaan korupsi di tiga kementerian dan melibatkan anggota DPR dalam kongkalikong APBN dinilai cukup kuat untuk mengalihkan perhatian media.

Pengalihan perhatian yang dilakukan SBY ini sejalan dengan Teori inferensi yang menyatakan bahwa manusia lupa bukan karena kehilangan memori tetapi karena informasi lainnya menghalangi hal yang ingin diingati. Teori ini, bersama dengan teori kemerosotan (decay theory), diajukan sebagai sebab-sebab mengapa manusia dapat melupakan sesuatu. (wiki-pedia.com) Dengan memanfaatkan teori inferensi, berita-berita Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK karena diduga ada kongkalikong APBN dengan DPR akan menutupi atau menghalangi informasi tentang kader Demokrat yang melakukan korupsi. Dan tampaknya berhasil, selama berminggu-minggu perhatian media teralih untuk memberitakan langkah Dipo Alam melaporkan tiga menteri ke KPK.

Langkah Dipo Alam untuk mengalihkan perhatian media tersebut sejalan dengan peristiwa langkah Dipo Alam sebelumnya pada 28 September 2012 yang merilis keterangan bahwa presiden telah mengeluarkan 176 ijin pemeriksaan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Para kepala daerah yang diperiksa umumnya dari partai politik dan yang terbanyak adalah dari Partai Golkar dan PDIP. (Vivanews. 28 September 2012). Tujuan dari pernyataan

Dipo Alam adalah memunculkan efek di masyarakat bahwa yang banyak melakukan korupsi adalah Partai Golkar dan PDIP dan bukan Partai Demokrasi.

Kesimpulan

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Dipo Alam telah melakukan politisasi kasus korupsi untuk kepentingan pencitraan SBY baik sebagai presiden maupun sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Tujuannya untuk tetap menampilkan citra SBY sebagai pribadi yang anti korupsi. Selain itu pencitraan dilakukan dengan tujuan bahwa yang melakukan korupsi hanya anak buah SBY baik di kementerian maupun di Partai Demokrasi, tetapi juga dilakukan oleh anggota DPR dan anggota partai lain.

Kepemimpinan SBY bisa dikategorikan sebagai pemimpin santai karena cenderung menghindari isu-isu penting dan lebih banyak membiarkan anak buahnya bertindak sendiri.

Bibliografi

- Ali, Eko Maulana, *Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan* (Jakarta: PT Multicerdas Publishing, 2001).
- Arifin, Anwar, *Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Bandung ; Remaja Rosda Karya, 2000).